

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa jumlah dana alokasi umum yang ditunda penyalurannya oleh pemerintah pusat Kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 sebesar Rp.242.009.513.392, namun berdasarkan perhitungan Pemprov, NTT pagu penundaan DAU yang ditunda sebanyak 545 dari 3313 kegiatan yang tersebar pada 51 SKPD. Terdapat 19 SKPD yang program/kegiatannya ditunda berdampak pada masyarakat secara umum. Seperti dinas kesehatan, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, RSUD Prof.Dr.W.Z.Johanes Kupang, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup dan SKPD lainnya yang program/kegiatannya berhubungan langsung dengan hidup Masyarakat.

6.2 SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur lebih mengalokasikan belanja modalnya pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat merangsang terciptanya sumber pendapatan baru.

2. Sebaiknya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan berorientasi pada manfaat bagi public.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*;. Edisi 4.. Salemba Empat, Jakarta
- Fino,Priyo, 2009. *Hubunga antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Edisi 3 Salemba 4: Jakarta
- Maemunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prakosa,2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah*; Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, YAA Vol 08 No 2.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap prediksi Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomu UII : Yogyakarta
- Rahmawati, 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta
- _____. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

_____.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

_____. UU No. 22 tahun 1999 *tentang pemerintah daerah* dan UU No. 25 tahun 1999 *tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah*, yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 *tentang pemerintah daerah* dan UU No. 33 tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah*

_____. UU No.107 tahun 2000 *tentang Pinjaman Daerah*

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 *Tentang Penundaan penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016*

<http://www.moral-politik.com/2016/08/anggaran-daerah-dipangkas-pemda-protos-ke-sri-mulyani>

[http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/02/pengertian dan defenisi-dana alokasi umum.html](http://globallavebookx.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-dan-defenisi-dana-alokasi-umum.html), diaskes, tanggal 27 Maret 2017.)